

Muhammadiyah, Ulama dan Cendekiawan

"Ketua Umum PP Muhammadiyah ke depan seharusnya adalah mereka yang memiliki karakteristik sebagai ulama sekaligus cendekiawan" (Din Syamsuddin, 2015)

PERNYATAAN Din Syamsuddin pada acara syawalan di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta 24 Juli 2015 merupakan sinyal. Bahwa kelak, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak bisa hanya memiliki satu karakteristik saja misalnya disebut sebagai ulama yakni memahami ilmu keislaman sekalipun mendalam. Tetapi juga tidak bisa hanya sebagai cendekiawan yakni hanya memahami ilmu-ilmu non keislaman seperti ilmu ekonomi, hukum atau ilmu politik saja.

Ketua Umum PP Muhammadiyah haruslah *multitalent*. Selain sebagai ahli ilmu keislaman sekaligus ahli dalam ilmu-ilmu non keislaman. Sebab di masa mendatang persoalan yang menghadang Muhammadiyah demikian kompleks bukan hanya berhadapan dengan masalah-masalah fikih (hukum Islam) dan masalah tauhid/akidah yang bersifat teologis saja, namun persoalan politik riil dan persoalan ekonomi riil masyarakat dan Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan sosok *multitalent* sehingga mampu membaca ayat *qauliyah* sekaligus ayat *qauniyah* secara tepat dan cermat.

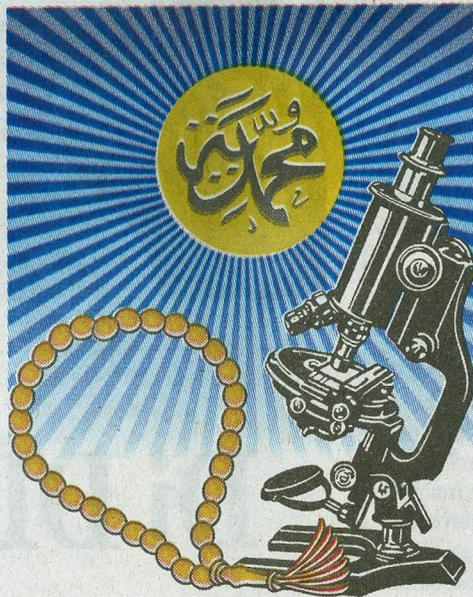
Ulama-Intelektual

Harapan Din Syamsuddin tentu beralasan dan tidak berlebihan. Karena lewat sosok inilah Muhammadiyah akan diperhitungkan di dalam percaturan politik serta ekonomi nasional bahkan internasional. Paham persoalan nasional karena Muhammadiyah tidak boleh lagi (meminjam Buya Syafii Maarif) sekadar menjadi 'pembantu negara'. Muhammadiyah ke depan harus dihadirkan sebagai 'penentu negara'. Sehingga kontribusinya akan semakin nyata dalam membangun dan 'membangkitkan negara' hendak kemana. Tidak seperti sekarang ini, Muhammadiyah hanya 'sebagai penonton di lu-

Zuly Qodir

ar panggung negara'. Padahal compang-campingnya Negara berdampak negatif bagi Muhammadiyah.

Jika Ketua Umum Muhammadiyah mampu mengetahui dan memahami dengan baik persoalan ekonomi nasional serta ekonomi warga Muhammadiyah, maka akan memungkinkan membuat pelbagai macam strategi. Sehingga



KR-JOKO SANTOSO

tahu bagaimana membuat perlawanan sekaligus pertahanan ekonomi nasional serta ekonomi warga Muhammadiyah yang terombang-ambing oleh sistem ekonomi liberal seperti sekarang tengah terjadi dengan massif di Indonesia. Mampu menentukan sikap di hadapan para cukong asing, para 'landa ireng' serta 'intel Melayu'. Mereka ini hanya mengurus kekayaan nasional dengan berbagai macam dalih, di tengah kegaduhan politik negeri ini.

Karakteristik ulama-cendekiawan diharapkan mampu membawa Muhammadiyah pada

koridor yang benar, tidak terombang-ambing oleh berbagai situasi politik yang sering gaduh, serta kondisi ekonomi yang sangat labil sehingga nyaris menghancurkan Indonesia. Sehingga, sosok ini harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait soal politik nasional dan ekonomi. Sebab Muhammadiyah tidaklah hidup sendiri tetapi berhadapan dengan kehidupan politik dan ekonomi yang nyata.

Tantangan Muhammadiyah

Selain persoalan politik yang sering gaduh dan ekonomi yang nyaris menjadikan Negara ini tersungkur, masalah hukum di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berbagai keputusan hukum seperti UU Migas, UU Air, UU Penanaman Modal Asing serta UU Kesehatan harus diteruskan pada wilayah perundang-undangan yang lain, yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan nasib bangsa Indonesia. Muhammadiyah harus melakukan jihad konstitusi agar bangsa ini selamat dari cengkeraman asing yang maha ganas dan membuat rakyat semakin sengsara di negerinya sendiri.

Disinilah letak pentingnya pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beberapa waktu lalu. Sebagai ulama tentu haruslah yang memahami secara mendalam ilmu-ilmu keislaman, sehingga mampu membawa Muhammadiyah menjadi mazhab Islam berkemajuan. Sedangkan sebagai cendekiawan, mampu membawa Muhammadiyah dalam percaturan politik ekonomi nasional sekaligus internasional. Sehingga tidak semakin terpuruk bangsa ini di hadapan bangsa asing serta terpuruk karena bangsa ini menjadi 'pengemis' dan budak di negerinya sendiri.

Kita tentu berharap dari nama-nama yang telah beredar di benak para Mukhtamirin nantinya akan benar-benar muncul sosok ulama-cendekiawan yang akan memimpin Muhammadiyah, 2015-2020. □ - g

*) **Dr Zuly Qodir**, Sosiolog UMY dan penggembara Mukhtamar Makassar.